

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatkan ekonomi merupakan langkah awal yang harus diperhatikan salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi di desa. Desa berkedudukan penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara mewujudkan rencana-rencana pembangunan ekonomi agar memberi peluang kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha. Pada desa sendiri terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan. Desa harus cakap dalam melihat dan memanfaatkan potensi apa saja yang ada pada wilayah tersebut. Potensi daerah merupakan sumber daya asli yang dimiliki oleh daerah yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan. Dengan memprioritaskan potensi lokal yang ada akan memberikan manfaat pada kualitas hidup masyarakat. Dalam mengolah potensi ini tentunya desa diharapkan dapat mendirikan kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang bisa memajukan perekonomian masyarakat di Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki seperti sumber daya alam, pariwisata, budaya, maupun mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki (Ansori et al., 2022). BUMDes merupakan lembaga ekonomi dan sosial yang didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai

lembaga ekonomi yang berada di desa, kehadiran BUMDes hendaknya tidak menjadi kompetitor terlebih lagi jangan sampai menjadi predator bagi usaha ekonomi masyarakat desa (Sinarwati & Prayudi, 2021). Kehadiran BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi ketimpangan pembangunan kota dengan desa (Sinarwati dkk, 2021). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.*

Hal ini semakin didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mana dalam peraturan tersebut terdapat pertimbangan dibentuknya BUMDes yakni bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah desa dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa yang mana pendirian badan usaha milik desa ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa tersebut (Ansori et al., 2022).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Bali. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan desa, pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong setiap desa agar mampu membentuk dan mengatur perekonomian desa melalui pembentukan BUMDes. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng yang semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data <https://bali.bps.go.id/>, jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebanyak 39,52 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan

bahwa keberadaan BUMDes di Kabupaten Buleleng dengan jumlah BUMDes terbanyak di Provinsi Bali belum mampu mencapai tujuan BUMDes yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kualitas kinerja BUMDes belum optimal, seharusnya BUMDes mampu mengimplementasikan cara yang tepat dalam mendukung kualitas kinerja dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem yang mampu meningkatkan nilai perusahaan untuk semua pemangku kepentingan perusahaan (Masitoh & Hidayah, 2018). *Good Corporate Governance* (GCG) mengatur perusahaan agar perusahaan mampu memberikan informasi yang jelas, benar dan tepat waktu kepada pemegang saham, pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan harus bersifat akurat, transparan dan tepat waktu agar semua penerima informasi dapat mengetahui kinerja perusahaan yang sebenarnya.

Good Corporate Governance merupakan praktik tata kelola perusahaan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, secara umum terdapat lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu: 1) *Transparency* merupakan prinsip mengenai keterbukaan informasi perusahaan itu sendiri, keterbukaan ini dirujuk pada pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2) *Accountability* yaitu prinsip yang menjelaskan mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3) *Responsibility* adalah prinsip yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban yang terdiri dari kesesuaian atau kepatuhan perusahaan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi

yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4) *Independency* merupakan prinsip kemandirian yang menyangkut keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5) *Fairness* merupakan prinsip kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (Masitoh & Hidayah, 2018).

Good Corporate Governance memiliki peranan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang baik. Hal ini didukung oleh pendapat (Akram Hirman et al., 2023) menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya GCG adalah menghasilkan nilai tambah bagi BUMDes, dan meningkatkan kinerja serta kontribusi BUMDes untuk memajukan perekonomian desa. *Good Corporate Governance* (GCG) umumnya sering diterapkan pada instansi besar, dibandingkan dengan instansi kecil seperti BUMDes. Penyebab yang mendasari permasalahan yakni sumber daya yang terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem tata kelola yang baik secara konsisten. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Akram Hirman et al., 2023) yang menunjukkan bahwa Implementasi GCG pada BUMDes yang terletak di Kecamatan Bungoro Sulawesi Selatan belum efektif dapat meningkatkan kualitas kinerja BUMDes akibat dari manajemen yang kurang profesional. Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi tidak menjadi hambatan bagi BUMDes untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi acuan dalam memastikan keberlangsungan usaha serta untuk meminimalisir terjadinya risiko kegagalan usaha yang dijalankan BUMDes. Mengacu pada permasalahan di atas penelitian ini berfokus pada BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun yang terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Tabel 1.1 Data Jumlah BUMDes Terbaik di Kabupaten Buleleng

Nama BUMDes	Status	Kecamatan
BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun	Terbaik	Kubutambahan
BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung	Terbaik	Kubutambahan
BUMDes Bhuana Utama Desa Panji	Terbaik	Sukasada
BUMDes Sari Nadi Desa Pemuteran	Terbaik	Gerokgak
BUMDes Dwi Amertha Sari Desa Jinengdalem	Terbaik	Buleleng

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

BUMDes yang terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan nama BUMDes Mandala Giri Amertha merupakan BUMDes yang meraih penghargaan ditingkat nasional dalam kategori berkembang. Dilansir dari <https://www.metrotvnews.com>, Desa Tajun merupakan salah satu desa dari lebih 74.957 desa di Indonesia dan satu satunya di kabupaten Buleleng yang termasuk kategori sepuluh besar desa yang memanfaatkan Dana Desa (DD) dengan baik. Desa Tajun berada di urutan ketiga setelah Desa Ponggok dan Desa Tirtinirmolo. Prestasi ini tidak lepas dari kontribusi BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun yang telah menyumbang pendapatan tahunan hingga miliaran rupiah selain itu adapun alasan memilih BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun sebagai tempat penelitian, karena BUMDes ini termasuk salah satu BUMDes dengan status terbaik di Kabupaten Buleleng yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dari tahun dari awal pembentukan pada tahun 2010.

BUMDes Mandala Giri Amertha telah menunjukkan prestasi yang signifikan dalam hal kinerja keuangan sejak didirikan.

Menurut Kepala BUMDes Mandala Giri Amertha yaitu Bapak Drs. I Nyoman Sugana mengatakan bahwa “BUMDes ini memiliki 4 jenis usaha yang beroperasi hingga saat ini diantaranya, Unit Usaha Pengelolaan Sarana Air Bersih, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Pasar Desa dan Unit Usaha Pengelolaan Sampah. Pada awalnya BUMDes ini hanya fokus pada unit usaha pengelolaan sarana air bersih dimana pada saat awal pembentukan BUMDes ini para pengelola hanya memiliki modal yang sangat minim yaitu 10 juta yang mereka pinjam dari dana desa hingga BUMDes ini mampu memberikan pendapatan bagi desa hingga ratusan juta. BUMDes berhasil meningkatkan pendapatan tahunan secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.

Seiring dengan perkembangan dan komitmen BUMDes Mandala Giri Amertha ini telah berhasil mengembangkan 4 unit usaha baru. Namun, meskipun telah mencapai banyak hal, BUMDes Mandala Giri Amertha juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Beberapa tantangan tersebut termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, kebutuhan akan peningkatan sistem manajemen, serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten. BUMDes mandala giri amertha ini mampu bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan ekonomi, seperti pandemi atau krisis, menunjukkan ketahanan dan kinerja keuangan yang baik.

Good Corporate Governance merupakan sistem yang dapat meningkatkan nilai perusahaan untuk semua pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip

GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran, sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Prinsip-prinsip ini membantu dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik, sehingga risiko keuangan dapat diminimalkan dan keuntungan maksimal dapat dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan GCG dapat mendukung kinerja keuangan BUMDes Mandala Giri Amertha, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapannya, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menyoroti penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan entitas yang relatif baru dalam struktur ekonomi Indonesia. Meskipun banyak penelitian tentang GCG di perusahaan besar, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dan berpengaruh pada BUMDes mandala giri amertha.

Penelitian sebelumnya telah banyak yang meriset terkait analisis penerapan *good corporate governance*, namun masih sedikit yang melakukan penelitian pada kinerja keuangan BUMDes. Adapun persamaan dan perbedaan dari riset yang dilakukan oleh (Wardani & Fauzi, 2018) yaitu Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan analisis penerapan *good corporate governance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan BUMDes selain itu, penelitian ini berada pada Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Penelitian sebelumnya belum ada yang memadukan analisis penerapan *Good*

Corporate Governance Dalam Mendukung Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul analisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) mandala giri amertha desa Tajun.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Adanya Identifikasi masalah pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan yaitu mengenai prinsip prinsip *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha Desa Tajun.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, peneliti memfokuskan untuk meneliti penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha Desa Tajun.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja keuangan BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun?
- 2) Bagaimana hambatan yang dialami dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja keuangan BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun?

- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja keuangan BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun?
- 4) Bagaimanakah dampak adanya penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja keuangan BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun.
- 2) Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja keuangan BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun.
- 3) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam mendukung kinerja keuangan BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun.
- 4) Untuk menganalisis dampak penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada BUMDes Mandala Giri Amertha

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun beberapa manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dan berbagai pihak terkait penerapan *good corporate governance*

dalam mendukung kinerja keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) mandala giri amertha desa Tajun.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemahaman lebih lanjut terkait penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan badan usaha milik desa.
- 3) Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di perpustakaan. Universitas Pendidikan Ganesha dan diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca mengenai *Good Corporate Governance* serta dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

b. Bagi BUMDes

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi acuan bagi BUMDes untuk bisa lebih memahami *Good Corporate Governance* dan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan dan nantinya diharapkan memberikan sumbangsih untuk keilmuan di masa depan.